

**POLA KADERISASI PARTAI POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG
(STUDI PADA PARTAI PERINDO DAN PARTAI BERKARYA)**

(Skripsi)

Oleh

MOCH. RIDHO HARTONI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung (Studi pada Partai Perindo dan Partai Berkarya)

Abstrak

Sistem kaderisasi sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan visi, misi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan “Bagaimana Pola Pembinaan Kaderisasi Partai Politik Perindo dan Partai Berkarya di Provinsi Lampung”.

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif karena cukup memberi kemudahan bagi penelitian ini. Peneliti dituntut untuk mengamati suatu masalah yang berkaitan dengan pola kaderisasi Partai Perindo dan Partai Berkarya, kemudian mendeskripsikan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah, prinsip kaderisasi yang dilakukan oleh Perindo dan Partai Berkarya dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip penting yaitu, terbuka, non-diskriminatif, dan berjenjang. Baik Perindo maupun Partai Berkarya telah berupaya menciptakan pola pembinaan kader di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup: tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik umum dan khusus; adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis; terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan; membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader; melakukan affirmative action dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Hanya saja problemnya kesadaran elite dan segenap pimpinan partai akan urgensi kaderisasi ini dapat dikatakan sangat kurang, sehingga kaderisasi menjadi problem hampir semua partai di Indonesia.

Kata Kunci : Pola Kaderisasi, Partai Politik, Provinsi Lampung

Patterns of Cadreization of Political Parties in Lampung Province (Study on Perindo Party and Berkarya Party)

Abstract

The regeneration system is very important considering the need for the transfer of political knowledge, not only related to the vision, mission, and strategy of political parties, but also matters related to the problems of the nation and state. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem above, namely: to find out and explain "How is the Pattern of Cadreization of Perindo Political Parties and Berkarya Parties in Lampung Province".

The researcher used a qualitative approach method because it was enough to provide convenience for this research. Researcher aims to observe a problem related to the regeneration pattern of Perindo Party and Berkarya Party, then describe the findings to answer the problem formulation.

The result of this research was that the principle of regeneration carried out by Perindo and Berkarya Party was carried out by taking into account three important principles, namely, being open, non-discriminatory, and tiered. Both Perindo and Berkarya Party had tried to create a pattern of cadre development in all cadre lines and cadre areas which includes: norms, rules and institutional arrangements in forming a cadre system, both general and specific; the existence of an open and democratic recruitment model; the existence of a continuous evaluation system for cadre development; establish a cadre network through interaction between cadres; carry out affirmative action in recruiting and implementing a pattern of fostering female party cadres in order to achieve an increase in the number of women in political parties, parliaments, and public positions. The problem is that the awareness of the elite and all party leaders about the urgency of this regeneration can be said to be very lacking, so that regeneration becomes problem for almost all parties in Indonesia.

Keywords: Cadreization Pattern, Political Party, Lampung Province

**POLA KADERISASI PARTAI POLITIK DI PROVINSI
LAMPUNG**

**(Studi Kasus Pada Partai Perindo dan Partai
Berkarya)**

(Skripsi)

Oleh :

MOCH. RIDHO HARTONI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Pada

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **POLA KADERISASI PARTAI POLITIK DI
PROVINSI LAMPUNG (STUDI KASUS
PADA PARTAI PERINDO DAN PARTAI
BERKARYA)**

Nama Mahasiswa : Moch. Ridho Hartoni

No. Pokok Mahasiswa : 1416021071

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.

NIP. 198106 2020064 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in blue ink, belonging to Drs. R. Sigit Krisbintoro, is written over the text of the second supervisor's name.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP. 196112 18198902 1 001

MENGESAHKAN



1. Tim Penguji

Ketua : Arizka Warganegara, S.IP, M.A., Ph.D.




Penguji : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juli 2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan.Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



Moch. Ridho Hartoni
NPM. 1416021071

RIWAYAT HIDUP



MOCH. RIDHO HARTONI, Lahir di Bandar Lampung 30 Mei 1996
Anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) Bersaudara putra dari pasangan
Hartoni Usman dan Soekowatie . Jenjang pendidikan penulis dimulai
dari Taman Kanak-Kanak TK Taruna Jaya Kota Bandar Lampung
pada tahun 2000. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 2
Perumnas Wayhalim Kota Bandar Lampung pada tahun 2002. Selanjutnya penulis melanjutkan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 (Persit) Kota Bandar Lampung pada
tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA
Negeri 5 Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan
dिलanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur MANDIRI pada tahun 2014 dan diterima
sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik
Universitas Lampung. Pada tahun 2017 penulis melakukan Studi KKN (Kuliah Kerja Nyata) di
Desa Klaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya dalam setiap langkah Penulis agar mampu menyelesaikan Skripsi ini.

Dengan rasa cinta dan hormat, Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Kakak - Kakakku dan Adikku yang kusayangi .
Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan

Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

“Ambilah Resiko, Kalau Anda Menang Anda Bakal Bahagia, Jika Anda Kalah, Anda Bakal Jadi Orang Yang Bijaksana”
(Warren Buffet)

“Ketika Seseorang Menghina Anda , Itu Adalah Pujian Bahwa Selama Ini Mereka Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Memikirkan Anda, Bahkan Ketika Anda Tidak Memikirkan Mereka”
(BJ Habibie)

“Cukup Satu Langkah Awal, Ada Batu Saya Singkirkan, Melangkah Lagi Ada Duri Saya Sibakkan, Terhadang Lubang Saya Lompati, Melangkah Lagi, Ada Api Saya Mundur Sejenak, Melangkah Lagi, Berjalan Terus Dan Mengatasi Masalah”
(Bob Sadino)

SANWACANA

Alhamdulillah... Segenap puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, karya ilmiah dengan judul, **“Pola Kaderisasi Partai Politik Di Provinsi Lampung (Studi Kasus Pada Partai Perindo Dan Partai Berkarya)”** dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih telah memberikan arahan yang baik kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung
3. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP. selaku Sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam mencari judul skripsi. Terima kasih atas bimbingan, saran, masukan serta kebaikannya yang telah bapak berikan sejak penulis menjadi mahasiswa

baru hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada bapak.

4. Bapak Arizka Warganegara, S.IP, M.A., Ph.D. Selaku Pembimbing Utama terima kasih atas ilmu dan kesabarannya dalam membimbing penulis. Terima kasih telah banyak membantu dan bersedia membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
5. Bapak Budi Harjo, S.Sos. M.IP. Selaku Pembahas Skripsi, terima kasih atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ini yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak.
6. Dosen – Dosen Khususnya Dosen Ilmu Pemerintahan dan staf – staf nya atas kebaikan, pembelajaran serta ilmunya dalam memberikan pendidikan kepada penulis.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Hartoni Usman dan Ibunda Soekowatie yang tak pernah letih memberikan semangat, dorongan doa serta didikan selama ini serta mengupayakan yang terbaik bagi bekal kesuksesan masa depan anak – anaknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayangnya serta balasan atas segala jasa ayahanda dan ibunda selama ini.
8. Kakak - kakak dan Adik kandungku Gita Marieska, Dwi Lestari, Moch. Rizki Hartoni dan Moch. Rafli Hartoni. Terima kasih atas peran, doa dan dukungan yang kalian berikan selama ini. Lalu Kak Alm. Hi. Muhammad Reza dan

Kak Riza Bayu Perdana yang tidak lupa juga selalu memberikan doa dan dukungan.

9. Saudara seperjuangan dari jaman SMA yaitu Arief Pocil, Beni Maulana, Dandy Pret, Ferdian Parto, Sigit Bboy, Zuan Pakpahan Gibson, Anisa Ipin, Faradesta Ndut, Decia Dhara, Ellenia Dafri, Iqbal Bibir, yang sudah memberikan waktu luang selama ini dan sharing hal hal kecil sehingga penulis mendapatkan motivasi dalam menulis skripsi ini.
10. Sahabat serta teman teman yg sudah dan sedang berjuang di masa perkuliahan ini Billy Hasnan Ijal, Aldi Dirga Mandor Rumah, Abu Yusri Ewok, Divin Coach, Sandi Rosadi, Doni Bengak, Brilliant Ar Rahmaan, Merah Warek, Dhian Kurniawan, Komang Evan, Pria Tri Nanda, Warek Saukani VapeStore, Ican Naci, Febri Yandi, yang sudah maupun pernah bersuka cita dan berduka cita bersama Serta teman teman Ilmu Pemerintahan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
11. Sahabat – Sahabat Waroeng Bunga, Adi Beler, Om Kucing, Arnen Bonen, Beni Meti, Bobby Acil, Bhoby Monyet, Chandra Pambudi, Dede Persada, Een Ijuk, Danang Cunong, Oiy Gondrong, Om Ido, Rafi Uhat, Reno Azab, Rian Kpop, Rizki Nyimm, Vandika Entong, Andre Ndre Lumut, Deri Kpop, Yudho Tompel, Hapri Cantona, Dwiky Nam, Jo Habibi, Bang Agha, Bang Ijuf, Oji Bancrit, Kondang Wilopo, Si Kembar Dede & Mamas, yang sudah menjadi teman sejak masa kecil hingga sampai saat ini.
12. Teman teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Heny, Dewi Fatmawati, Anggi Mega, Wahyu Hidayat Tullah, di Desa Kelaten Lampung Selatan atas

partisipasi dan kerjasamanya sehingga penulis mampu menyelesaikan KKN tersebut.

13. Jembet Dan Kuning yang telah menemani dan memberikan dukungan, support di Percetakan Nawi serta doa di masa akhir perkuliahan penulis.

Bandar Lampung, 27 Juli 2021

Penulis

Moch. Ridho Hartoni

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik.....	14
B. Kaderisasi Partai Politik.....	18
C. Kerangka Fikir.....	24

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Penentuan Informan.....	29
E. Jenis Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Pengolahan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	35
I. Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	37

BAB IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Partai Perindo.....	39
B. Gambaran Umum Partai Beringin Karya.....	43
C. Pola Kaderisasi Perindo dan Partai Berkarya.....	51

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Kaderisasi Partai Perindo	56
B. Pola Kaderisasi Partai Berkarya	86
C. Pembahasan	109

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Informan Penelitian	29
2. Perbandingan Pola Kaderisasi Partai Perindo dan Berkarya	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Logo Partai Perindo	42
2. Logo Partai Berkarya.....	48

DAFTAR SINGKATAN

DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRT	: Dewan Pimpinan Ranting
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
PERIDO	: Partai Persatuan Indonesia
BERKARYA	: Beringin Karya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Orde Baru, terjadi perubahan pada sistem politik, di mana kebebasan berada penuh ditangan warga Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai-partai politik baru bermunculan, yang merupakan sebagian kecil indikasi atas kebebasan yang dirasakan pasca orde baru. Demokrasi telah mengalami berbagai macam hambatan yang kadang berkebalikan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Marcus Mietzner (2009:121) mencatat bahwa “demokratisasi di Indonesia lebih menampilkan wajah popularitas figur di hadapan rakyat. Pemaknaan demokrasi jauh dari persoalan kinerja politik, namun mengarah pada performa individu. Masyarakat telah berharap banyak pada figur pemimpin untuk menegakkan demokrasi ketimbang sistem politik maupun kinerja partai politik”.

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Adanya demokrasi, berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang memegang kekuasaan, namun tidak mungkin rakyat menjalankan kekuasaan tersebut secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum. Pada negara yang menganut demokrasi terutama di Indonesia menuntut adanya sistem perwakilan yang

memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili, karena masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang sangat pluralitas dengan berbagai ragam suku, kebudayaan, adat istiadat, serta kepercayaan. Tujuannya agar wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan mencerminkan ragam dukungan yang ada di masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan atau diabaikan.

Menurut Subiyanto (2014:85), menyatakan bahwa, “partai politik pada hakekatnya harus mengamalkan demokrasi dengan memberi stimuli para kadernya agar memberikan yang terbaik pada Negara dan bangsa guna membangun mentalitas juara untuk memenangkan setiap kompetisi dengan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya”. Demi terwujudnya suatu demokrasi yang baik partai politik harus mempunyai kader-kader partai yang berkualitas, unggul, kuat serta solid melalui proses rekrutmen dan kaderisasi politik, karena melalui kader partai yang akan maju dalam proses pemilu sebagai wakil rakyat.

Partai politik haruslah berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, dengan mendudukkan kader-kadernya menjadi pejabat pemerintah sebagai wakil rakyat, untuk dapat turut berperan dalam mengambil dan menentukan keputusan politik berupa kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen politik yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik.

Budiardjo (2008:408), menjelaskan bahwa, “rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik yang ditentukan. Partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik, pada fungsi ini seseorang mengalami proses politik yaitu menyeleksi, menjaring dan melatih calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi dan melaksanakan amanat dari masyarakat. Menjadi pemimpin tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat, oleh karena itu. Masalah seleksi kepemimpinan mencakup kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepemimpinan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri”.

Pada bagian lain, Firmanzah (2008:71), menyatakan bahwa, “partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen politik, rekrutmen politik merupakan cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa dipundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan. Selain melakukan rekrutmen partai politik perlu melakukan pendidikan politik kepada kader-kader politiknya.

Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan visi, misi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara”. Dengan mempunyai kader-kader politik yang berkualitas, partai politik tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader yang berkompentensi sebagai calon pemimpin politik di pemerintahan serta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintah sebagai pemimpin yang baik dan amanah yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai politik dimulai dari penerimaan anggota, penyeleksian kader, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Kaderisasi belum menjadi prioritas bagi partai politik di Indonesia. Selama masa orde baru hingga era reformasi, mayoritas partai politik masih mengandalkan figur, ketenaran bahkan dinasti, untuk meraih dukungan dalam pemilihan umum.

Banyak partai politik di Indonesia saat ini yang menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara finansial untuk memperoleh suara terbanyak dalam suatu pemilihan umum misalnya partai politik merekrut selebritis untuk diajukan dalam pemilihan umum, seperti yang dilakukan oleh Partai Berkarya yang mengusung nama Tomy dan Titiek Soeharto yang masih sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pewaris masa orde baru, serta Partai Perindo yang mengusung nama Harry

Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC Group, salah satu grup stasiun televisi terbesar di Indonesia.⁵

Kebijakan kaderisasi instan lebih banyak menghasilkan kader yang pragmatis. Rendahnya kesadaran akan kualifikasi inilah yang akan menimbulkan partai untuk memaksakan diri dalam mengajukan figur yang tidak berkualitas dalam pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut sangatlah merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang namun tidak semua partai politik mempunyai sistem kaderisasi yang jelas. Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader dari partai politik tentang visi, misi, dan ideologi partai politik masih dirasa sangat kurang.

Pemahaman mengenai demokrasi, sistem politik, dan tata kelola penyelenggaraan negara terasa timpang antara kader partai besar dan partai kecil, maka dapat dikatakan bahwa partai politik belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik untuk memberikan pendidikan politik. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat kondisi internal maupun eksternal partai.

Kesesuaian paham ideologis antara orang-orang yang direkrut dengan organisasi partai politik yang bersangkutan adalah hal yang perlu diingat dalam perekrutan kader, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau kekuasaan semata, seperti misalnya merekrut artis atau mantan penguasa tanpa melihat pengetahuan dan

⁵ Diakses pada laman <https://mediaindonesia.com/read/detail/277210-partai-politik-dan-kaderisasi> diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 16.22 WIB

keahlian mereka, terutama yang berkaitan dalam dunia politik. Saat ini, banyak partai politik yang hanya memanfaatkan faktor ketenaran seseorang dalam dunia politik dianggap sebagai faktor penentu untuk mendapatkan simpatisan di kalangan masyarakat.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan lima penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kaderisasi dan sayap partai politik. Tentu ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Sebagai berikut :

1. Penelitian Pertama Amaliya Hidayatul Fajrina (2017) tentang kaderisasi partai politik yang berjudul Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya. Penelitian ini membahas tentang strategi rekrutmen oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi pemuda di kota Surabaya. Studi ini menggunakan Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Philip Althoff. Data diperoleh melalui indepth interview dengan beberapa nara sumber yaitu pengurus aktif DPC Partai Gerindra Surabaya, serta para kader muda Partai Gerindra Surabaya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra di kota Surabaya memiliki beberapa strategi dalam melakukan rekrutmen kader muda, diantaranya adalah sistem terbuka, namun terkadang juga ditemukan sistem patronase didalamnya. Hasil penelitian juga menunjukkan model strategi rekrutmen sistem figur masih menjadi strategi yang populer. Diketahui bahwa semua strategi tersebut memberi kesempatan secara luas dan terbuka kepada

seluruh muda-mudi Indonesia yang merasa memiliki minat dan kemampuan untuk bergabung bersama dalam Partai Gerindra di kota Surabaya.

2. Penelitian kedua dilakukan Deby Triasa (2012) Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus DPD Golkar Jawa Tengah) alasan yang melatar belakangi penulis dalam karya ilmiah ini adalah bahwa Partai Golkar telah melahirkan kader-kader baru yang notabene berasal dari golongan pengusaha maupun profesi lainnya dan dipercaya menjadi pemimpin partai maupun menempati posisi-posisi strategis di organisasi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintahan di era reformasi ini. Perubahan ini menciptakan paradigma baru Partai Golkar dimana Partai Golkar telah ikut mereformasi internal partai sejalan dengan bergulirnya reformasi untuk merubah citra partai di masa orde baru, yaitu sebagai partai pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai Golkar dalam merekrut calon anggota Partai Golkar, mengetahui kaderisasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar untuk melahirkan kader-kader partai sesuai dengan paradigma baru Partai Golkar, dan mengetahui pelembagaan politik Partai Golkar dalam rangka memperkokoh internal maupun eksternal partai. menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik Partai Golkar di era reformasi bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi dalam

rekrutmen calon anggota partai. Kaderisasi politik Partai Golkar sudah bagus, tetapi masih ada kendala masalah keuangan dan intruktur materi. Pelembagaan politik Partai Golkar belum sempurna karena masih adanya ketergantungan partai terhadap pihak-pihak yang berasal dari non partai, khususnya masalah dana.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Aditya Surya dan Agus Satmoko (2015) yang berjudul Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik (Studi Pada DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk) penelitian ini mengkaji pola kaderisasi kepemimpinan khususnya pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki secara cermat sistem kaderisasi kepemimpinan, cara kerja dan pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan Kab. Nganjuk. Serta faktor pendukung dan penghambat pola kaderisasi kepemimpinan partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kaderisasi kepemimpinan partai politik terdiri dari proses rekrutmen, seleksi kader, dan pendidikan kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk di atur dalam anggaran rumah tangga partai ketetapan kongres III PDI Perjuangan No.09/TAP/KONGRES III/PDI-P/2010 BAB I mengungkap penetapan calon anggota dan anggota yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Adapun faktor pendukung adalah kekompakan dan pemahaman yang sama terhadap ideologi Pancasila,

sedangkan faktor penghambat adalah sebagian anggota yang tidak memahami ideologi Pancasila sebagai tugas partai.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh M. Djadjono (2008) meneliti tentang organisasi sayap partai dengan judul Formulasi Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap Partai latar belakang dari penelitian ini adalah meskipun keberadaan organisasi sayap partai sudah ditegaskan dalam UU No. 2 tahun 2008 tata aturan hubungan dengan parpol belum jelas dirinci dalam UU maupun AD dan ART parpol. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa hubungan parpol dengan sayap partai harus bersifat menguntungkan, selain itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh sayap partai harus sepenuhnya didukung oleh parpol induknya. Maka dari itu organisasi sayap partai perlu melaksanakan fungsi-fungsi dengan baik.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Bayu Mitra Adhytama Kusuma dan Theresia Octastefani (2017) tentang sayap partai dengan judul Negoisasi Dakwah Dan Politik Praktis (Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis) dilatar belakangi dengan agama Islam yang sering digunakan sebagai basis ideologi dan perjuangan di era demokrasi, umat Islam saat ini memiliki berbagai saluran politik melalui partai politik Islam.

Tetapi setiap partai memiliki kepentingan yang berbeda meskipun sama-sama menggambarkan dirinya sebagai partai dakwah atau rumah politik Muslim Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi sayap keagamaan Islam oleh partai politik nasionalis lebih pada politik dakwah

daripada dakwah. Sehingga dalam negosiasi antara dakwah dan politik praktis, aspek politik lebih diuntungkan daripada aspek dakwah.

Partai Berkarya dan Partai Perindo merupakan partai baru yang belum memiliki basis kekuatan dan dukungan yang cukup banyak. Sehingga untuk membangun basis kekuatan dan dukungan tersebut, diperlukan kader-kader yang mumpuni serta mampu memperjuangkan visi dan misi partai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai baru seperti Perindo dan Partai Berkarya tidak meraih cukup suara untuk lolos di kursi legislatif. Meski sebagai pemilik media pertelevisian ternama, Hary Tanoë dinilai terlalu melakukan pencitraan pada iklan-iklan politik yang dibuat tanpa melakukan bukti konkret. Bantuan-bantuan yang diberikan hanya sebagai “pemanis” di tengah ramainya isu politik.⁶

Sebagai partai baru, Partai Berkarya juga berupaya untuk meraih suara dengan memanfaatkan kekuatan orde baru. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto mengatakan Indonesia akan kembali seperti masa orde baru. Menurut Titiek, sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Mantan Presiden Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia. Namun, pada kenyataannya, justru ada banyak ketimpangan dan kenyataan yang terjadi karena saat ini sebagian besar

⁶ Diakses pada laman <https://www.radarpna.id/nasional/politik/2019/03/22/partai-baru-sulit-lolos/> dikases pada tanggal 4 Februari 2020 Pukul 03.22

rakyat Indonesia sudah mulai berpikir, bahwa justru pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang membuka “luka lama”.⁷

Partai perindo dan Partai Berkarya merasa optimis akan memenangkan kursi legislatif pada awal pemilu. Dari laporan internal partainya, meskipun tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi maupun DPR RI, Partai Perindo dipastikan bakal menempatkan tujuh wakilnya di DPRD kabupaten dan kota. Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Lampung Jolly Sanggam. Dia merinci, perwakilan Partainya berhasil mendapatkan dua kursi di DPRD Kota Bandarlampung, 1 kursi di DPRD Lampung Selatan, 1 Kursi di DPRD Lampung Barat, 1 kursi di DPRD Lampung Utara, 2 kursi di DPRD Tulangbawang Barat, 1 kursi di DPRD Mesuji, dan 1 kursi di Lampung tengah. Bila dibandingkan partai yang baru lainnya, Perindo jauh lebih unggul, meski jauh dari target yang diharapkan. Sayangnya, pencapaian Perindo Lampung tak diikuti Partai Garuda, PSI dan Partai Berkarya. Sebab deri caleg yang diusung, tidak ada satupun perwakilannya mampu mendapatkan kursi di 15 DPRD kabupaten/kota. Diakui Ketua DPW Partai Berkarya Lampung A. Jazuli Isa yang mengatakan bahwa belum ada satu perwakilan Partai Berkarya yang duduk di kursi parlemen.⁸ Dengan demikian, artinya terdapat perbedaan pada pola kaderisasi kedua partai tersebut, di mana pola kaderisasi dari Perindo dapat dinilai lebih baik karena

⁷ Diakses pada laman <https://www.merdeka.com/politik/quick-count-psi-perindo-berkarya-hanura-tak-capai-4-suara-masuk-4235.html> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 Pukul 04.55

⁸ <https://radarlampung.co.id/2019/05/13/perindo-lampung-memimpin-jajaran-parpol-baru/> diakses pada tanggal 13 September 2020 Pukul 22.17 WIB

masih mampu memperoleh suara untuk kursi legislatif dibandingkan partai baru lainnya, termasuk Partai Berkarya.

Adapun penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas adalah pada tujuan penelitian sebelumnya tidak ada yang meneliti tentang bagaimana prinsip dan pola pembinaan kaderisasi, melihat situasi pada saat ini banyak partai politik yang memilih kader secara instan tidak berdasarkan pada pengalamannya di dunia politik, yang mengakibatkan partai terkesan memaksakan diri dalam mengajukan figur yang tidak berkualitas pada pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun nasional. Peneliti tertarik mengambil penelitian kaderisasi dengan penekanan pada pola dan pembinaan kaderisasi, sehingga kader partai lebih memahami tentang visi, misi, dan ideologi partai politik itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung (Studi pada Partai Berkarya dan Partai Perindo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Pembinaan Kaderisasi Partai Politik Perindo dan Partai Berkarya di Provinsi Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan “Bagaimana Pola Pembinaan Kaderisasi Partai Politik Perindo dan Partai Berkarya di Provinsi Lampung”.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin mengetahui model kaderisasi partai politik dalam merekrut kader-kader politik.
 - b. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Menjelaskan fenomena sosial politik yang ada.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik, dan sumbangan pemikiran dalam memperkuat demokratisasi di berbagai daerah.
 - b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian ditempat lain

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:404).

Firmanzah (2008:66) mengutip pernyataan Max Weber dalam bukunya *Ekonomik Et Societie* yang memberikan defenisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas mengenai partai politik, partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara terutama di negara dengan menerapkan sistem demokrasi. Secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi

pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

2. Fungsi Partai Politik

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008:67).

Fungsi, hak, dan kewajiban sebuah partai politik telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 12:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar
- b. Menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.

- d. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- e. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut budiardjo dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mempunyai fungsi salah satunya sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan rakyat. Menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

- b. Sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Proses ini dapat

diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

d. Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dengan berbagai macam suku bangsa, sosial-ekonomi, maupun agama. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk

mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.(Budiardjo, 2008:405).

B. Kaderisasi Partai Politik

Syamsudin (2016:52) menyatakan bahwa, “kaderisasi pada partai politik lebih bersifat sebagai proses intervensi dari partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi sangat bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik”.

Menurut Adrianus dalam Harahap (2017:17), menyatakan bahwa, “kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki layolitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh kecenderungan tipe dari partai yang bersangkutan. Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai politik. Tanpa kaderisasi kepemimpinan, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan”.

Dengan demikian, artinya, kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah untuk mempersiapkan calon-

calon untuk siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan partai.

Syamsudin (2016:52) dalam panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik partai politik mengatakan bahwa, “ partai politik harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup, antara lain:

- a. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus;
- b. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis;
- c. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;
- d. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi;
- e. Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partai politik, parlemen dan jabatan publik lainnya; dan

- f. Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan”.

1. Prinsip Kaderisasi

Pada bagian lain, Syamsudin (2016:52), menyatakan bahwa, “kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Terbuka*. Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi perlu disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota partai politik maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/ atau dengan penilaian lain yang telah ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi. Dalam kaitan ini, perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan. Dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi kepemimpinan akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

- b. *Non-Diskriminatif*. Pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarkhi parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya.
- c. *Berjenjang*. Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).”

Ditambahkan oleh Syamsudin (2016:52), penggunaan model penjenjangan seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Pertama, dilakukan karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan pada pembekalan kapasitas lainnya. Intinya, materi pengkaderan diandaikan dalam skema piramidal.

Pentahapan materi dalam skema piramidal akan berguna untuk dapat memastikan bahwa setiap kader partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (standarisasi).

Kedua, penjenjangan kaderisasi sebagai akibat dari kebutuhan persyaratan meniti karir organisasi pada posisi-posisi yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat. Ini misalnya tampak dari persyaratan tingkat kaderisasi tertentu yang harus diikuti oleh calon ketua partai, sekretaris jenderal dan sebagainya di setiap tingkatan.

Namun demikian penjenjangan yang didasarkan pada materi kaderisasi secara otomatis akan berpengaruh pada penjenjangan karir politik yang akan dicapai oleh politisi. Sebagai contoh, seorang yang telah mendapatkan *training* kaderisasi tingkat pertama, karier politiknya akan berhenti sebagai pengurus parpol ataupun anggota legislatif atau kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Pada akhirnya penjenjangan kaderisasi ini dibutuhkan.

2. Model Kaderisasi

a. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Pada umumnya partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai modern, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan *training* tertentu oleh partai

politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota parpol di partai yang pelebagaan politiknya bagus dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keluaran kader sesuai dengan visi dan misi parpol yang bersangkutan. Proses kaderisasi anggota parpol dilakukan secara sistematis, berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.

Sayangnya di Indonesia, banyak partai politik yang melakukan proses kaderisasi secara insidental dan biasanya hanya diadakan pada waktu menjelang pemilu atau pilkada untuk pemenangan partai atau dalam kaitannya pembekalan calon anggota legislatif. Padahal proses kaderisasi yang bersifat terstruktur selain dapat membantu partai politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana pelebagaan partai telah mengakar pada anggota-anggotanya.

b. Kaderisasi untuk non anggota partai politik

Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasiasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai

memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan (Syamsudin, 2016:52).

Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.

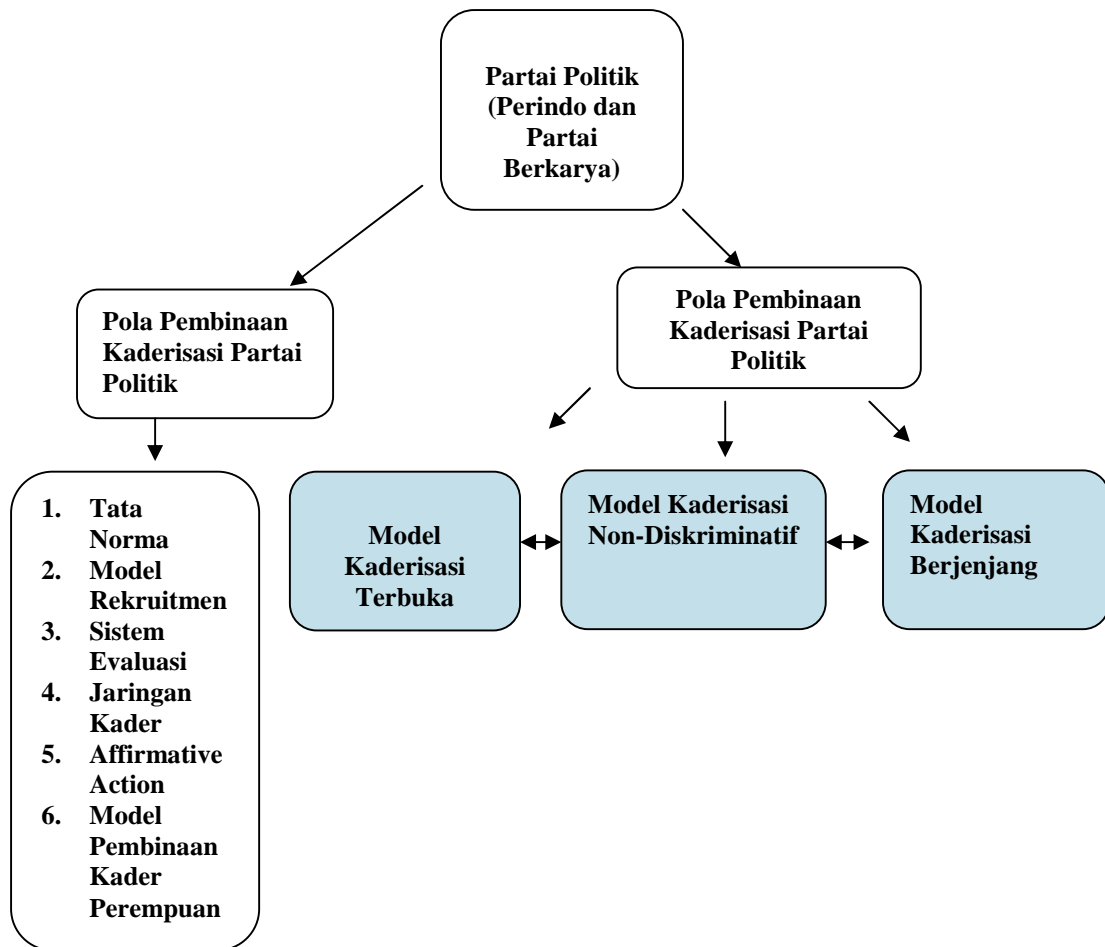
C. Kerangka Pikir

Partai politik menjalankan salah satu fungsinya, yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen politik di sini maksudnya adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan mengadakan proses seleksi/penjaringan, rotasi dan mobilitas politik pada anggota atau kader dari partai politik untuk penempatan jabatan di dalam atau di luar partai (eksekutif dan legislatif) berupa jabatan administratif maupun politik yang berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat serta pengalaman dari kader tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipasi kaum muslimin, ulama, tokoh masyarakat dan intelektual.

Pelaksanaan rekrutmen politik dengan menjalankan tujuan dan fungsinya untuk menghasilkan kader yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat. Perluasan dalam rekrutmen kader ini termasuk pada bagaimana menyusun kriteria untuk calon kader yang akan menjadi kualifikasi serta bagaimana mekanisme yang akan dilakukan dalam proses ini. Untuk itulah sebelum melakukan rekrutmen politik, partai politik tentunya melakukan proses pengkaderan untuk menghasilkan kader-kader yang mempunyai kualifikasi sebagai kader yang berkualitas untuk ditempatkan sebagai pejabat publik melalui arena pemilukada maupun pemilu legislatif.

Sehingga hal ini dapat teliti, bagaimana model kaderisasi yang dilakukan partai politik baru seperti Perindo dan Partai Berkarya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas dan solid terhadap partainya dan mampu memenangkan kursi legislatif.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini:



Bagan 1. Skema Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Sugiyono, 2011:7). Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif karena cukup memberi kemudahan bagi penelitian ini. Peneliti dituntut untuk mengamati suatu masalah yang berkaitan dengan pola kaderisasi Partai Perindo dan Partai Berkarya, kemudian mendeskripsikan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian kualitatif memberikan kesempatan peneliti untuk dapat mengeksplorasi informasi terhadap informan mengenai konsep dan pola pembinaan kaderisasi partai politik, terutama pada partai baru yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja yaitu pada partai politik Perindo yang beralamat di Jalan Way Sabu, Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya Timur, Kota Bandar Lampung; dan Partai Berkarya

yang beralamat di Jalan HRM Mangundiprojo No 20, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Ini merupakan bentuk pra analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan akan menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. (Bungin, 2012:41)

Penelitian ini menempatkan partai politik Perindo dan Partai Berkarya yang ada di Provinsi Lampung. Sebagai fokus penelitian adalah bagaimana pola kaderisasi yang dilakukan partai politik dalam menghasilkan kader yang berkualitas menggunakan beberapa indikator model kaderisasi yaitu:

- a. Terbuka
- b. Non-Diskriminatif
- c. Berjenjang
- d. Tata Norma
- e. Model Rekrutmen
- f. Sistem Evaluasi
- g. Jaringan Kader

- h. Affirmative Action
- i. Model Pembinaan Kader Perempuan

D. Penentuan Informan

Pemilihan informan didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Menurut Sanapiah Faisal teknik pengambilan sampel purposive adalah sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalam hubungan ini lazimnya dinyatakan atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Kriteria informan adalah yang terlibat di dalam partai politik seperti ketua partai politik DPW Perindo dan Partai Berkarya yang ada di Provinsi Lampung (Ari Setiawan, 2012:29). Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Alasan Memilih Informan
1	Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung	1	Ketua DPW merupakan pimpinan tertinggi sehingga lebih mengerti tentang kondisi partai, kekuatan serta kelemahan partai.
2	Dewan Penasihat DPW Partai Perindo Provinsi Lampung	1	Dewan penasihat memahami tentang situasi di lapangan dan kondisi pemilih di suatu wilayah, sehingga lebih mengerti bagaimana membuat strategi untuk memperoleh suara terbanyak
3	Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung	1	Ketua DPW merupakan pimpinan tertinggi sehingga lebih mengerti tentang kondisi partai, kekuatan serta kelemahan partai.

4	Dewan Penasihat DPW Partai Berkarya Provinsi Lampung	1	Dewan penasihat memahami tentang situasi di lapangan dan kondisi pemilih di suatu wilayah, sehingga lebih mengerti bagaimana membuat strategi untuk memperoleh suara terbanyak
5	Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Perindo Provinsi Lampung	1	Ketua Badan Pemenangan Pemilu bertanggung jawab dan memahami situasi di lapangan serta lebih mengerti tentang strategi di dalam dan luar partai
6	Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Berkarya Provinsi Lampung	1	Ketua Badan Pemenangan Pemilu bertanggung jawab dan memahami situasi di lapangan serta lebih mengerti tentang strategi di dalam dan luar partai
7	Kader Partai Perindo (Laki – Laki)	1	Berguna untuk mengetahui serta memahami pola kaderisasi dan perekrutan politik yang dilakukan oleh partai dalam membentuk kader yang berintegritas dan mengusung nama baik partai, untuk mencapai tujuan dan cita-cita partai.
8	Kader Partai Perindo (Perempuan)	1	Berguna untuk mengetahui serta memahami pola kaderisasi dan perekrutan politik yang dilakukan oleh partai dalam membentuk kader yang berintegritas dan mengusung nama baik partai, untuk mencapai tujuan dan cita-cita partai.
9	Kader Partai Berkarya (Laki – Laki)	1	Berguna untuk mengetahui serta memahami pola kaderisasi dan perekrutan politik yang dilakukan oleh partai dalam membentuk kader yang berintegritas dan mengusung nama baik partai, untuk mencapai tujuan dan cita-cita partai.
10	Kader Partai berkarya (Perempuan)	1	Berguna untuk mengetahui serta memahami pola kaderisasi

			dan perekrutan politik yang dilakukan oleh partai dalam membentuk kader yang berintegritas dan mengusung nama baik partai, untuk mencapai tujuan dan cita-cita partai.
--	--	--	--

E. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat dokumentasi serta alat perekam. Adapun yang akan diwawancarai adalah narasumber yang merupakan anggota partai antara lain kader partai politik, ketua, sekretaris atau anggota dari partai politik.

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, dokumen, hasil penelitian yang terkait dengan studi. Adapun beberapa buku yang dibaca oleh penulis adalah buku-buku ataupun hasil penelitian sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak. Berdasarkan jenisnya penelitian ini

bersifat kualitatif, maka tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara (Burhan, 2011:77)

1. Wawancara

Mewawancarai narasumber yang berkecimbung didalam partai politik ataupun yang berada di sayap partai politik, wawancara dalam kualitatif bersifat mendalam wawancara dan observasi bisa dilakukan secara bersamaan, wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam data yang didapat dari observasi (Rully, 2014:136).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur dengan berpedoman pada pernyataan Fylan dalam Miles dan Gilbert (2005:66) bahwa, “wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Tujuan dari wawancara semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya”. Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur agar dapat mengeksplorasi jawaban informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka secara langsung, antara penulis dengan informan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi menjadi observasi partisipan (*participant observation*), partisipasi non-partisipan (*non-participant observation*) dan observasi terhadap objek (Widi, 2010:237).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau aktifitas kelompok yang diteliti. Teknik observasi digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak dapat di dapat pada saat wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

3. Dokumentasi

Selain itu juga untuk memperdalam studi peneliti akan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen kegiatan dari organisasi sayap partai politik.

Serta membaca literatur-literatur yang terkait dengan studi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang

bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Miles dan Huberman (2014:246) mengemukakan bahwa, “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut mencakup :

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah ataupun hipotesis penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil dari jawaban informan yang diperoleh dari wawancara serta melihat langsung kondisi pertai melalau observasi.

2. Data Reduksi (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan pertransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama

penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti adalah membuat ringkasan tentang hal-hal pokok yang dilakukan Partai Berkarya maupun PSI dalam strategi pemenangan pemilu dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

3. Penyajian Data (*data display*)

Data Display akan memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami peristiwa maupun kejadian yang terjadi. Miles dan Huberman dalam melakukan display data selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan) dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang data yang ada. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian.

Pada penelitian ini, ini rencana analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah, mentranskrip hasil wawancara yang dibagi berdasarkan pola kaderisasi yang menjadi fokus masalah yaitu pola terbuka, non diskriminatif, berjenjang, Tata Norma, Model Rekrutmen, Sistem Evaluasi, Jaringan Kader, Affirmative Action, dan Model Pembinaan Kader Perempuan, lalu membaginya dalam tema-tema sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis dilakukan berdasarkan pada informasi yang diperoleh lapangan berdasarkan teori yang digunakan.

I. Teknik Validasi/Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori (Denzin dalam Patton, 2015:331).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331):

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

3. Kebergantungan (*Dependality*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Semakin tinggi tingkat reliabilitas yang tercapai maka semakin baik pula penelitian tersebut.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

1. Sejarah Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada awalnya merupakan ormas (organisasi masyarakat) yang didirikan sejak 24 februari 2013. Sejak awal sudah banyak yang mendukung Perindo dialih fungsikan dari ormas menjadi partai, dan hal ini diwujudkan pada Sabtu 7 februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran. Partai Perindo didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, yang merupakan pengusaha dan pemilik MNC Group, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media penyiaran. Disebutkan oleh Ariviyanti dan Nurfebriani (2017:50) bahwa, “Hary Tanoe pernah mencoba berpolitik di Partai Nasdem dan Hanura sebelum membentuk Partai Perindo, yang kemudian menjadi sumber inspirasi Harry Tanoe untuk membentuk Partai Perindo. Partai Perindo bertekad menjadi mitra kerja pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa, sehingga dapat mewujudkan cita-cita untuk mencapai masyarakat sejahtera lahir dan batin”.

Ariviyanti dan Nurfebriani (2017:51) kembali menjelaskan bahwa, “ukuran kesejahteraan bagi Partai Perindo untuk menggambarkan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara agrerat tidak hanya ditinjau dari segi ekonomi saja tetpi juga dari segi sosial seperti, pendidikan dan kesehatan yang

dapat dilihat dari Tingkat Melek Huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH) sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”.

Kemenkumham menyatakan Partai Perindo lolos verifikasi badan hukum pada 8 Oktober 2015, untuk lolos verifikasi syarat yang harus dipenuhi setiap parpol baru dengan memiliki akta notaris, domisili kantor dan melengkapi kepengurusan di setiap daerah (DPW, DPD, DPC). Partai perindo telah memiliki badan hukum yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 tertanggal 08 Oktober 2014. Tepat tanggal 8 Oktober 2016 Partai Perindo berulang tahun ke-2 sekaligus merayakan 2 tahun sebagai parpol yang terverifikasi dan memiliki badan hukum⁹. Partai Perindo setelah didirikan mulai memperkenalkan diri, melalui kekuatan media massa yang dimiliki HT melakukan sosialisasi secara gencar. Pemberitaan di media massa sampai penggunaan ‘Mars Perindo yang kerap ditampilkan di sejumlah televisi swasta yang berafiliasi dengan MNC Group. Pemilu 2019 menetapkan 14 peserta mudian optimistis dapat meraih peringkat pertama di pesta demokrasi rakyat, melakukan berbagai pendekatan program yang sesuai dengan harapan masyarakat. proses rekrutmen calon legislatif dilakukan sesuai keinginan masyarakat dengan memperhatikan kompetensi, kepercayaan masyarakat, dan moral.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Partai Perindo

a. Visi

⁹ Kompasiana dalam www.kompasiana.com diakses pada 19 Juli 2020 pukul 00.10 WIB

Visi dari Partai Perindo yaitu :

“Mewujudkan Indonesia yang berkemajuan, bersatu, adil, makmur, sejahtera, berdaulat, bermartabat dan berbudaya”. Indonesia yang berkemajuan adalah Indonesia yang ditandai dengan majunya peradaban, tingginya tingkat pendidikan rakyat, meningkatkan derajat kesehatan”.

b. Misi

Misi dari Partai Perindo yaitu :¹⁰

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan UUD 1945
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat
- 3) Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dalam rangka menjaga keutuhan NKRI
- 4) Menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5) Menegakan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara
- 6) Mendorong tumbuhnya ekonomi nasional yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan warga negara Indonesia

¹⁰ Profile Partai Perindo, diakses dari <https://partaiperindo.com/> pada tanggal 19 Juli 2020 Pukul 02.30 WIB

c. Tujuan Partai Perindo

Tujuan Partai Perindo adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945.
- 2) Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh pembukaan undang-undang dasar 1945.
- 3) Menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mewujudkan Negara yang sejahtera dan beradilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Arti Lambang Partai

Setiap logo atau lambang memiliki arti tersendiri, begitupula dengan logo yang dimiliki oleh Partai Perindo. Adapun lambang dari Partai Perindo adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Logo Partai Perindo

Logo partai Perindo digambarkan dengan bentuk lingkaran yang dibalut dengan dominasi warna biru, putih, dan merah. Pada logo tersebut terdapat gambar berbentuk sayap burung rajawali yang memiliki makna optimisme

¹¹ *Ibid.*

pada masa depan Republik Indonesia, dan melambangkan keberanian. Sayap tersebut juga digambarkan dalam 5 kepak sayap yang berarti adalah Pancasila, yang merupakan azas dari partai Perindo. Warna merah putih yang terdapat pada bagian atas memiliki makna nasionalisme kebangsaan. Partai Perindo menggunakan warna merah dan putih berbentuk kibaran bendera dibagian atas lingkaran, yang bermakna nasionalisme kebangsaan Indonesia, dan menjadi identitas partai Perindo terbentuk. Warna biru mempunyai makna sebagai warna yang semangat dalam perdamaian dan selalu mewarnai gerak serta langkah partai dalam menjalankan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia, sedangkan warna merah secara umum diketahui mempunyai makna berani.¹²

4. Struktur Kepengurusan Partai Perindo

Struktur Kepengurusan Partai Perindo adalah sebagai berikut :

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai eksekutif partai di tingkat nasional, dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai eksekutif partai di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai eksekutif partai di tingkat kabupaten/kota, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai eksekutif partai di tingkat kecamatan, dewan Pimpinan Ranting (DPRt) sebagai eksekutif partai di tingkat kelurahan/desa.

B. Gambaran Umum Partai Beringin Karya (Berkarya)

1. Sejarah Partai Beringin Karya (Berkarya)

¹² *Ibid.*

Partai Berkarya didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016 dan mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan dikeluarkannya SK Menkumham No. M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2016. Partai Berkarya merupakan fusi dari 2 (dua) buah partai politik yakni Partai Beringin Karya (BK) & Partai Nasional Republik (NASREP).¹³

Partai Berkarya merupakan partai besutan Hutomo Mandala Putra “Tommy Soeharto”. Putra bungsu Presiden RI ke-2 Soeharto menjabat sebagai ketua majelis tinggi dan dewan pembina Partai Berkarya, sekjen Partai Berkarya adalah Badaruddin Andi Picunang dengan ketua umum partai Neneng Anjarwaty Tuti sebelumnya Neneng menjabat sebagai ketua umum Partai Nasrep. Partai Berkarya menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-III di Solo, Jawa Tengah tepatnya di Lor In Hotel Karanganyar pada 10 Maret 2018 hingga 13 Maret 2018 yang diikuti oleh seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia.¹⁴

Agenda Rapimnas ke-III salah satunya adalah mengangkat Tommy Soeharto menjadi Ketua Umum. Keputusan tersebut dilakukan setelah mendengar suara dari seluruh pengurus daerah yang meminta Tommy Soeharto menjadi Ketua Umum Berkarya. Pengangkatan Tommy sebagai ketua umum berlangsung secara aklamasi hal ini dikarenakan seluruh kader pengurus kabupaten, provinsi dari Seluruh Indonesia menginginkan Tommy Soeharto

¹³ Partai Berkarya, diakses dari <https://www.berkarya.id/> pada tanggal 19 Juli 2020 Pukul 03.00 WIB

¹⁴ *Ibid.*

menjadi Ketum Tommy Soeharto resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya periode 2017-2022 sesuai dengan SK Menkumham tahun 2017. Keputusan diambil setelah mendengarkan pandangan dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya seluruh Indonesia. Pengangkatan tersebut tercatat dalam keputusan Rapimnas ke-III Partai Berkarya Nomor 07/Keputusan/Rapimnas III Partai Berkarya/3/2018Rangkaian verifikasi partai politik dilakukan sejak 2017 hingga pada tanggal 9 Februari 2018 Partai Berkarya ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai satu dari 4 (empat) partai baru dari 16 (enam belas) partai politik yang berhak mengikuti Pemilihan Legislatif 2019.¹⁵

Partai Berkarya sebagai partai muda memiliki fokus kegiatan pengabdian dan perjuangan politik dalam beberapa topik yang menjadi isu nasional terkini. Ruang lingkup aktivitas Partai Berkarya adalah nasional 34 provinsi, 514 Kabupaten & Kotamadya, dan ribuan Kecamatan, puluhan ribu kelurahan/desa se-Indonesia hingga pembinaan ke tingkat Anak Ranting.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Partai Berkarya

a. Visi

Visi dari Partai Berkarya adalah :

¹⁵ *Ibid.*

“Terwujudnya kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa, aman, sejahtera, adil, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁶

b. Misi

Misi dari Partai Berkarya adalah :

- 1) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan dan akuntabel yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.¹⁷
- 3) Memerangi dan membasmi korupsi serta menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian atas hak dan kewajiban asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Membangun karakter bangsa dan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang bertaqwa, aman, sejahtera dan bermartabat.
- 5) Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam membangun perdamaian dunia dengan politik luar negeri yang bebas aktif.
- 6) Melahirkan pemimpin yang jujur, tegas, berkemampuan, anti korupsi, memiliki jiwa kepemimpinan, pengemban, pengayom dan pelayan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

- 7) Melakukan rekonsiliasi nasional yang utuh dalam rangka menyatukan kembali tekad bersama untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik dan unggul sesuai cita-cita Proklamasi 17-08-1945 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus empatpuluh lima).
- 8) Membangun sumber daya manusia yang berakhlak Mulia, sehat, cerdas dan terampil.
- 9) Membangun sistem perekonomian nasional yang berorientasi pada penguatan ekonomi kerakyatan, membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja seluas-luasnya bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam secara tepat guna dan berdaya guna serta berkeadilan, berwawasan lingkungan dan kemaritiman.
- 10) Mengembangkan otonomi daerah untuk lebih memacu percepatan pembangunan di seluruh tanah air guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tujuan Partai Berkarya

Tujuan Partai Berkarya terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tujuan Umum
 - a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

- b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- d) Mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b) Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan politik dan pemerintahan.
- c) Memperjuangkan visi dan misi Partai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Arti Lambang Partai Berkarya



Gambar 2. Logo Partai Berkarya

Lambang Partai berbentuk rantai lingkaran berwarna orange yang ditopang pita warna orange. Tulisan Partai Berkarya warna hitam, di dalamnya terdapat gambar pohon beringin terdapat warna hijau, hitam dan kuning.

a. Arti warna pada lambang terdiri dari warna Hitam, Kuning, Hijau dan Orange adalah sebagai berikut: ¹⁸

- 1) Warna Hitam memiliki makna keteguhan dan ketegasan dalam melaksanakan Perjuangan
- 2) Warna Kuning memiliki makna energi, kemuliaan, kerjasama, idealisme dan kesejahteraan.
- 3) Warna Hijau memiliki makna muda, pertumbuhan, pembaharuan, dan persahabatan
- 4) Warna Orange memiliki makna kesungguhan kerja keras, karya nyata dalam mewujudkan kebersamaan untuk mencapai kejayaan bangsa yang dicita-citakan.

b. Arti Simbol Pada Lambang

Arti simbol pada lambang Partai Berkarya adalah :¹⁹

- 1) Pohon Beringin melambangkan tempat bernaung dan berhimpun berbagai suku, agama, golongan dan ras warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersatu untuk memperjuangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).
- 2) Lingkaran rantai dengan anak rantai 34 (tiga puluh empat) tampak dari depan saling berkaitan dan berpasang-pasangan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

melambangkan persaudaraan, jumlah provinsi se-Indonesia pada saat partai ini dilahirkan pada tahun 2016 (dua ribu enam belas), simbol semangat dan harapan baru.

- 3) Tulisan PARTAI BERKARYA dalam dan luar pita bermakna identitas diri Partai Berkarya yang mengutamakan kreatifitas dan kekaryaan.
- 4) Gambar lambang berbentuk lingkaran rantai yang ditopang pita bermakna jalinan kekeluargaan dan persaudaraan yang erat, mandiri, bersinergi membentuk dan mengembangkan partai, komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Struktur Kepengurusan Partai Berkarya

Organisasi Kepengurusan Partai Berkarya terdiri dari tingkat Pusat, (DPP) tingkat Provinsi (DPW), tingkat Kabupaten/Kota (DPD), struktur organisasi di tingkat kecamatan (DPC), tingkat kelurahan/desa (DPAC) serta tingkat RT dan tingkat RW (DPRt). Kepengurusan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW dan RT disusun dengan memperhatikan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Partai Berkarya di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).²⁰

²⁰ *Ibid.*

C. Pola Kaderisasi Perindo dan Partai Berkarya

Keberadaan partai politik sangat penting dan mendasar, karena partai politik merupakan pilar dari demokrasi. Rumusan kode etik politik dan partai politik yang disusun oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa, partai politik merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai-partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) sekaligus menjadi faktor pendorong (*driven factor*) praktik demokrasi yang baik pada suatu negara. Rekrutmen berkaitan dengan sejauhmana partai politik melakukan seleksi, kandidasi dan menyiapkan kader-kader politik untuk memimpin negara dan pemerintahan yang bersih, anti-korupsi, berintegritas, akuntabel, dan dapat dipercaya. Sayangnya, harapan ideal tersebut masih belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik, karena proses rekrutmen dan kaderisasi selama ini cenderung menerapkan pola dan gaya tradisional.

Partai yang dikembangkan lebih belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu. Partai-partai politik juga menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi. Sebagian besar parpol belum

memiliki sistem kaderisasi yang jelas, sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarkis. Hasil kajian yang dilakukan oleh P2P bekerja sama dengan IMD5 menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai.

Riset tersebut senada dengan pandangan sejumlah narasumber yang diwawancarai, juga menggarisbawahi terjadinya dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi dan kandidasi calon-calon anggota legislatif di Indonesia. Rekrutmen banyak dilakukan kepada politisi yang pindah dari partai satu ke partai lainnya, kader-kader artis atau pelawak, orang-orang kaya, dan para pengusaha yang sering diragukan kemampuan politiknya.

Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai politik dimulai dari penerimaan anggota, penyeleksian kader, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Kaderisasi belum menjadi prioritas bagi partai politik di Indonesia. Selama masa orde baru hingga era reformasi, mayoritas partai politik masih mengandalkan figur, ketenaran bahkan dinasti, untuk meraih dukungan dalam pemilihan umum.

Banyak partai politik di Indonesia saat ini yang menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara

finansial untuk memperoleh suara terbanyak dalam suatu pemilihan umum.²¹ Partai politik saat ini cenderung merekrut selebritis untuk diajukan dalam pemilihan umum, seperti yang dilakukan oleh Partai Berkarya yang mengusung nama Tomy dan Titiek Soeharto yang masih sangat dikenal oleh masyarakat sebagai pewaris masa orde baru, serta Partai Perindo yang mengusung nama Harry Tanoesoedibjo sebagai pemilik MNC Group, salah satu grup stasiun televisi terbesar di Indonesia.

Kebijakan kaderisasi instan lebih banyak menghasilkan kader yang pragmatis.²² Rendahnya kesadaran akan kualifikasi inilah yang akan menimbulkan partai untuk memaksakan diri dalam mengajukan figur yang tidak berkualitas dalam pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut sangatlah merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang namun tidak semua partai politik mempunyai sistem kaderisasi yang jelas. Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader dari partai politik tentang visi, misi, dan ideologi partai politik masih dirasa sangat kurang.

Pemahaman mengenai demokrasi, sistem politik, dan tata kelola penyelenggaraan negara terasa timpang antara kader partai besar dan partai kecil, maka dapat dikatakan bahwa partai politik belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik untuk memberikan pendidikan politik. Artinya, perlu adanya pengetahuan dari para kader mengenai sistem politik, sehingga partai politik perlu menyediakan wadah bagi kader sebagai pendidikan politik.

²¹ <https://akurat.co/id-1209430-read-artis-maju-di-pilkada-2020-yang-instan-sulit-menang> diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 23.22 WIB

²² *Ibid.*

Wadah bagi kader tersebut maksudnya adalah, pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik terkait visi dan misi yang ingin diwujudkan, guna memajukan sistem demokrasi. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh kader, akan semakin meningkatkan kualitas kader tersebut. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat kondisi internal maupun eksternal partai.

Partai Perindo dan Partai Berkarya hanya mengandalkan popularitas dari media dan masa lalu pemimpin era orde baru, dan belum terbukti mampu memimpin Indonesia seperti apa yang dijanjikan dalam visi dan misi partai. Menurut Nasution (2019), sebagai partai baru yang tidak memiliki basis massa yang jelas, pemanfaatan media dan sejarah sangat diperlukan, selain lebih mudah menjangkau masyarakat, juga dapat membentuk *branding* dari partai yang sesuai dengan visi dan misi. Partai Berkarya dan Partai Perindo merupakan partai baru yang belum memiliki basis kekuatan dan dukungan yang cukup banyak. Sehingga untuk membangun basis kekuatan dan dukungan tersebut, diperlukan kader-kader yang mumpuni serta mampu memperjuangkan visi dan misi partai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai baru seperti Perindo dan Partai Berkarya tidak meraih cukup suara untuk lolos di kursi legislatif. Meski sebagai pemilik media pertelevisian ternama, Hary Tanoë dinilai terlalu melakukan pencitraan pada iklan-iklan politik yang dibuat tanpa melakukan bukti konkre, sedangkan Partai Berkarya

dinilai terlalu mengandalkan nama orde baru yang dipimpin mantan presiden Soeharto.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti peroleh dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini, yaitu :

1. Prinsip kaderisasi yang dilakukan oleh Perindo dan Partai Berkarya dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip penting yaitu, terbuka, non-diskriminatif, dan berjenjang. Baik Perindo maupun Partai Berkarya telah berupaya menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup:
 - a. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus;
 - b. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis;
 - c. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;
 - d. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi;
 - e. Melakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun

jabatanjabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partapo politik, parlemen dan jabatan publik lainnya; dan

- f. Melakukan Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

Hanya saja, pada fakta yang terjadi di lapangan, kedua partai cenderung melakukan perekrutan instan, tanpa memberikan pendidikan politik terlebih dahulu kepada calon kader. Meskipun menganut prinsip non-diskriminatif, pada kenyataannya, partai lebih dahulu merekrut calon dengan melihat latar belakang profil dari calon kader, dan hubungan kekerabatan calon kader dengan kader lainnya. Padahal, Kualitas kaderisasi pada dasarnya mempengaruhi kualitas kader yang disiapkan oleh partai, baik untuk mengisi jabatan kepengurusan di internal partai maupun dalam rangka mengisi jabatan publik di luar partai, di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional dan daerah. Semakin tinggi kualitas sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai maka semakin baik pula kualitas kader yang dinominasikan partai untuk jabatan politik di dalam dan di luar partai. Sebaliknya, semakin buruk kualitas kaderisasi yang dilakukan partai maka semakin tidak siap pula partai menyuplai kandidat kader dari internal partai untuk mengisi jabatan publik. Hanya saja problemnya kesadaran elite dan segenap pimpinan partai akan urgensi kaderisasi ini dapat dikatakan sangat

kurang, sehingga kaderisasi menjadi problem hampir semua partai di Indonesia.

B. Saran

Saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengurus Partai Perindo maupun Berkarya perlu mempertahankan model rekrutmen caleg yang telah ada saat ini dan terus menumbuhkan kesadaran pada diri kader bawasanya kedua partai tersebut adalah partai yang memperjuangkan aspirasi rakyat dilakukan pula terobosan-terobosan baru dalam hal strategi yang bisa memperkuat partai demi kemenangan pemilu yang akan datang.
2. Sebaiknya kedua partai berupaya untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif pada semua kadernya dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan politik yang lebih baik lagi.
3. Sebaiknya perempuan terlibat dan dijamin kepastian keterlibatannya dalam politik dan parlemen diberlakukan *affirmative action*, dengan beberapa bentuk kebijakan yang mendukung peran politik perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Alwi, Hasan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bandung : Gramedia Pustaka
- Basrowi, 2002. *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka cipta: Jakarta.
- Burhan, 2011. *Metode penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Perdana: Jakarta.
- Bungin, 2015. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Rajagrafindo: Depok
- Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indriawan, Rully. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Surabaya : Refika Aditama
- Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kurniawan, Benny, 2012, *Metodelogi Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusa, Cet.I
- Miles, Jeremi, Paul Gilbert. 2005. *A Handbook of Research Method for Clinical and Healt Psychology*. New York : Oxford University.
- Miles, Matthew B dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis*. United Stated of America : Library of Congres Catalogue-in Publication Data.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Neuman, W. Laurence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*. British Library Catalogue in Publication Data: United States of America.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods 4th Edition*. Library of Congress Catalogue-in Publication Data: United States of America.
- Setiawan, Ari. 2011. *Metodologi penelitian kebidanan*. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Subiyanto, Ibnu. 2014. *Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader*. Galang Pustaka: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Syamsudin. 2016. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. LIPI, Jakarta.

SUMBER LAIN :

- Aditya Surya dan Agus Satmoko (2015). *Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik (Studi Pada DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk)*. Vol 2 No 3. Kajian moral dan Kewarganegaraan. hal. 754-769
- Amaliya Hidayatul Fajrina. 2017. *Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya*. Vol 6 No 1. Jurnal Politik Muda, hal. 1-6
- Deby Triasa (2012). *Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus DPD Golkar Jawa Tengah)*. Vol 1 No 1. Journal of Politic and Government Studies, hal.1-14
- Insan Harapan Harahap (2017). *Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*. Jurnal Ilmu Politik Universitas Bakrie.
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/277210-partai-politik-dan-kaderisasi>